

2018, OMBUDSMAN ACEH TERIMA 150 PENGADUAN

Jum'at, 18 Januari 2019 - Ilyas Isti

Banda Aceh, Ombudsman RI Perwakilan Aceh sepanjang tahun 2018 menerima sebanyak 150 laporan atau pengaduan masyarakat terkait berbagai maladministrasi dalam pemberian layanan publik.

Secara keseluruhan, laporan tahun 2018 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2017 lalu yang mencapai 203 laporan. Jenis pengaduan umumnya terkait penyimpangan prosedur, penundaan berlarut dan tidak patut. Dari total laporan tersebut, sebanyak 135 laporan ditindaklanjuti Ombudsman Aceh, dan 15 laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

"Kalau kita lihat laporannya memang turun, tapi kalau dari jumlah pelapor ada ratusan, karena ada juga satu laporan mewakili ratusan orang, seperti kasus guru," ujar Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husein pada konferensi pers capaian kinerja tahun 2018 dan harapan 2019 di Kantor Ombudsman Perwakilan Aceh, Rabu (16/1).

Taqwaddin menambahkan, hal yang paling banyak dilaporkan masyarakat pada tahun 2018 adalah perihal kepegawaian atau tes CPNS, kemudian sertifikasi, tenaga kontrak dan tunjangan-tunjangan yang belum dibayar.

Sementara untuk urutan paling banyak pengaduan yakni Kota Banda Aceh yang menempati urutan pertama sebagai daerah yang paling banyak diadukan kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh.

Dia merincikan Kota Banda Aceh diadukan sebanyak 61 kali laporan, disusul Aceh Besar 24 laporan dan Aceh Utara 8 laporan. "Tetapi bukan berarti semakin banyak laporan itu tidak baik, ini bisa jadi memang masyarakatnya sudah lebih tahu tentang hak-hak mereka dalam hal pelayanan publik," terangnya.

Untuk tahun 2019, pihaknya akan fokus untuk verifikasi dan penyelesaian laporan lebih cepat serta mempermudah masyarakat untuk mengakses pengaduan ke Ombudsman Perwakilan Aceh.